PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERULANG DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

Albetr Pangestu¹, Riri Tri Mayasari², Betra Sarianti³, Mikho Ardinata⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Abstrak

Kata Kunci:
Pembinaan Khusus,
Pencurian, LPKA

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya, LPKA merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang berwenang yang diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada anak didik permasyarakatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi narapidana anak tersebut, dilapangan masih sering terjadi adanya pelaku tindak kejahatan pidana pencurian berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu, dan adanya anak yang berusia 19 tahun yang ditempatkan pada LPKA. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pembinaan terhadap warga binaan anak yang berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu kali melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan apa faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan tujuan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti yang didasarkan atas data sekunder yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka, data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi serta data tersier yakni data pendukung lainnya. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak-anak pelaku pidana pencurian berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu di LPKA Kelas II Bengkulu yaitu pembinaan keagamaan, pembinaan pendidikan, dan pembinaan keterampilan. Adapun faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana pencurian yaitu faktor penghambat pembinaan dan faktor pendukung pembinaan.

ARTICLE INFO

Keywords:

Special Development,
Theft, LPKA.

ABSTRACT

The Special Children's Development Institution (LPKA) is an institution where children serve their criminal term, LPKA is the final stage of the authorized criminal justice system which is tasked by the state to provide guidance and protection to correctional students who are appropriate and in accordance with the condition of the child inmate, in the field there are still often perpetrators of repeated theft crimes in the special development institution for class II children in Bengkulu, and there is a 19-year-old child who is placed in LPKA. The question in this thesis is what is the form of coaching for children who are repeatedly fostered at the Bengkulu Class II Children's Special Development Institution this time committing the crime of theft at the Bengkulu Class II Children's Special Development Institution and what are the factors that cause inmates to repeat the crime of theft at the Bengkulu Class II Children's Special Development Institution. In this study, the author uses the Empirical Juridical research method with the aim of providing answers to the researcher's questions based on secondary data collected from library materials, primary data obtained from interviews and documentation as well as tertiary data, namely other supporting data. Forms of coaching for children who commit repeat theft crimes at the special coaching institution for grade II children in Bengkulu at LPKA Class II Bengkulu are religious guidance, educational guidance, educational guidance, and skills development. The factors that cause inmates to repeat the crime of theft are factors that inhibit coaching and supporting factors for coaching.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak merupakan sebuah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dikaruniai kehormatan serta harkat maupun martabat yang menyertai terbentuknya manusia dengan seutuhnya (Hasanah & Rinwigati, 2023). Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang, seseorang yang akan berumur 12 tahun dan yang belum berumur 18 tahun dan dituduh melakukan sebuah tindak pidana dianggap sebagai anak (Agustiawan et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa merupakan sebuah tanggung jawab kita semua sebagai seorang manusia dewasa untuk melindungi anak-anak dalam segala situasi, termasuk dalam situasi yang memiliki pengajaran yang unggul, kesehatan yang baik, perawatan yang lembut, dan keselamatan (Karmawan, 2020).

Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak dan juga hak-hak mereka ditegakkan, memungkinkan mereka semua untuk hidup, serta tumbuh, berkembang, dalam terlibat semaksimal mungkin sejalan dengan martabat manusia dan terlindungi dari prasangka dan kekerasan (Al et al., 2023). Negara berupaya melindungi dan membela hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berfungsi untuk mengoptimalkan dan mengadaptasi hak-hak tersebut.

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pada dasarnya merupakan fenomena sosial, dan setiap perbuatan tunduk pada norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat, mempunyai kedudukan hukum, dan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari (Marc & Picard, 2006). Seperti halnya ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas dan melanggar hukum, maka tindakan tersebut dipandang patut untuk dipertanggungjawabkan. Hukuman fisik adalah langkah pertama dalam proses “sanksi”, yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ini (Fauzi, 2016). pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan, serta secara efektif menakut-nakuti orang lain.

Selama di penjara, anak-anak ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak yang kadang disebut dengan nama LPKA. Dalam konteks lain, hal ini mengacu pada hukuman integratif yaitu, meningkatkan dan mengembalikan kekompakan masyarakat yang sehat melalui pelatihan kompensasi menggunakan model pelatihan. Pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 bertujuan untuk memantapkan derajat ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, dan profesional agar peserta didik korektif memahami kesalahannya, mengembangkan diri, dan tidak melakukan kejahatan lagi (Umar & Bachmid, 2020).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sejauh ini diketahui menawarkan program pembinaan kepada remaja pelaku kejahatan di Bengkulu. Menurut informasi yang penulis peroleh dari website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas dan Sistem Basis Data Pemasyarakatan (SDP) yang penulis telusuri sendiri, per Desember 2020, terdapat empat puluh dua (44) anak di Kelas II Bengkulu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sedang menjalani pembinaan dan proses hukum di Kanwil Bengkulu. Pada bulan April, ada 11 warga pada bulan Mei berjumlah 21.000 orang pada bulan Juni, ada 35 pada bulan Juli, ada 36 pada bulan Agustus, ada 36 pada bulan September, ada 39 pada bulan Oktober, ada 40 dan di bulan november ada 44, desember ini ada 44 penghuni kriminal anak.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, anak yang bergelut dengan hukum ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak untuk mendapat pembinaan khusus. Masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan lembaga-lembaga ini semuanya memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pembangunan, yang khususnya penting bagi siswa yang terdaftar dalam program pemasyarakatan (Sagaf, 2024). Ternyata jabatan-jabatan tersebut sangat menentukan keberhasilan pendampingan peserta didik di lembaga pemasyarakatan, hal ini bertujuan untuk menjamin tidak menghambat pertumbuhan psikologis dan mental anak setelah proses hukum selesai. Hal ini penting untuk ditekankan karena, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, anak harus diperlakukan berbeda

dengan orang dewasa ketika berinteraksi dengan sistem hukum, sehingga anak didik masyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (GOOD, 2015).

1.2 Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang sering disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengujian ketentuan hukum dan realitas sosial yang relevan. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer/dasar, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat sebagai sumber awal melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner adalah awal mula studi lapangan ini. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur, buku, dan sumber lain sebagai pelengkap data primer. Setelah semua data terkumpul, kemudian semua data dianalisis secara kualitatif. Cara berpikir deduktif adalah metode menganalisis data yang caranya dimulai dari data yang bersifat umum kemudian disusun kesimpulan yang bersifat khusus. Dapat disimpulkan bahwa berpikir deduktif adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan data dan fakta umum.

DISKUSI

2.1 Bagaimana bentuk pembinaan terhadap warga binaan anak yang berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu kali melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

LPKA Kelas II Bengkulu merupakan wadah sistem peradilan anak yang dijalankan bersama oleh Negara dan sejumlah pihak lainnya. Dalam hal ini, pendampingan bagi pelaku remaja bersifat unik dan berbeda dengan pendampingan bagi orang dewasa. Sekolah ini tidak membedakan antara mendidik siswa yang memiliki riwayat kriminal apapun dan hanya mendidik anak di bawah usia delapan belas tahun sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan pendampingan remaja pelaku kejahatan adalah untuk memulihkan rasa

kemanusiaannya tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan psikologisnya.

Lihat Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) untuk informasi formulir bimbingan bagi peserta didik di LPKA Kelas II Bengkulu. Peneliti berbicara dengan Bapak Heppy Suheri, staf Subbagian Pendidikan, dan bimkesmas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Ia mengklaim, per 2 Februari 2024, terdapat banyak pilihan pembinaan bagi warga binaan, antara lain:

1) Pembinaan Keagamaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu melalui wawancara dan dokumentasi, bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bengkulu meliputi berbagai program antara lain shalat lima waktu berjamaah, membacakan Alquran, mengaji, dan memberikan kajian spiritual kepada siswa setiap hari Jumat. Ini semua disediakan oleh Kementerian Agama. Dengan teknik kelompok/simultan, petugas LPKA Kelas II Bengkulu memberikan bimbingan agama kepada siswa. Tujuan dari pembelajaran agama yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bengkulu adalah untuk membantu siswa menjadi lebih sadar moral dan perilaku.

Kehidupan siswa sangat terdampak dengan pelajaran agama yang diajarkan di LPKA Kelas II Bengkulu. Seluruh siswa wajib mengikuti acara keagamaan yang diagendakan LPKA Kelas II Bengkulu, kecuali dalam keadaan sakit. Sebab tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memajukan peserta didik dan memberi nilai baik kepada masyarakat sekitar dan teman-teman terkait dengan hak-hak peserta didik di LPKA Kelas II Bengkulu yang meliputi hak atas kemandirian, bimbingan, pembinaan, dan pelayanan pendidikan yang memadai.

2) Pembinaan Pendidikan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana (Andik PAS) berhak mendapat pengajaran dan pelatihan yang layak (Maharidho Deel Ziko & Mitro Subroto, 2022). Hal ini juga menekankan pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan dalam negeri dan kontribusinya yang signifikan terhadap kemajuan kesejahteraan

manusia. Oleh karena itu, ada keyakinan kuat bahwa pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi hari dimana mereka siap untuk berdiri dan mengambil rasa kepemilikan atas tindakan mereka.

Mengingat ada beberapa banyak pertimbangan maka LPKA Kelas II Bengkulu hendak mendirikan sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program PKBM yang hendak diselenggarakan di LPKA Kelas II Bengkulu yaitu Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pembentukan PKBM sangat diperlukan bagi LPKA Kelas II Bengkulu guna menunjang tugas dan fungsi LPKA Kelas II Bengkulu, termasuk membimbing siswa yang sedang menjalani hukuman penjara di sana. Selain itu, kehadiran PKBM menjamin masa depan siswa akan lebih cerah setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat, agama, dan negara yang berharga.

3) Pembinaan Keterampilan

Guna membina keterampilan siswa, LPKA Kelas II Bengkulu telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Diantaranya senam, futsal, takraw, voli, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, karate, renang, pramuka, dan tari. Selain itu, LPKA Kelas II Bengkulu membantu siswa dengan program pelatihan kerja agar setelah lulus mereka siap bekerja dan memulai usaha sendiri di bidang industri antara lain pengelasan, batik, kerajinan tangan, perikanan, dan pertanian.

Selain itu, LPKA Kelas II Bengkulu bekerja sama dengan sejumlah pihak luar untuk memberikan pengajaran berbagai mata pelajaran yang tidak berada di bawah pengawasan langsung pengawas tetap sekolah pada saat latihan keterampilan. Misalnya LPKA Kelas II Bengkulu bekerja sama dengan Kwartir Cabang Pramuka Bengkulu dalam kegiatan kepanduan.

Terkait dengan keberadaan LPKA Kelas II Bengkulu sepanjang tahun 2021 telah membina 4 orang anak didik, tahun 2022 telah membina 4 anak didik dan 2023 telah membina 9 anak didik yang bermasalah dengan hukum tentang pencurian.

a) Daftar anak didik tahun 2021 NAMA ANAK DIDIK

No	Nama Andik	Tindak Pidana	Usia (Thn)	Lama Pidana
1	HS	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	18	2 Thn 10 Bln
2	RS	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	17	2 Thn 2 Bln
3	IR	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	16	1 Thn 6 Bln
4	JJ	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	17	3 Bln

Jika dilihat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 4 anak didik dengan tindak pidana pencurian. Tidak ada anak pelaku tindak pidana pencurian berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu.

b) Daftar anak didik tahun 2022

No	Nama Andik	Tindak Pidana	Usia (Thn)	Lama Pidana
1	AF	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	17	2 Thn
2	JJ	Pasal 363 & 372 KUHP Ttg Pencurian & Penggelapan	17	10 Bln & 6 Bln
3	SM	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	17	1 Thn 3 Bln
4	MD	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian	17	3 Thn 8 Bln

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan ada 1 anak pelaku tindak pidana pencurian berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu, anak didik yang berinisial JJ dengan kasus pertama pencurian dan kasus kedua yaitu pencurian dan penggelapan. Menurut keterangan dari Bapak Heppy Suheri, anak didik yang berinisial JJ sempat kabur dari LPKA saat dibina untuk kedua kalinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak pelaku pencurian berulang berinisial JJ, pelaku memberikan keterangan bahwa dia melakukan pencurian berulang dikarenakan kebutuhan sehari-hari yang kurang untuk dirinya maupun keluarganya. Bisa dianggap bahwa pelaku terpaksa melakukannya. Pelaku juga memberikan keterangan untuk masalah pelaku yang kabur saat penangkapan yang kedua kalinya dikarenakan, pelaku berpikir dia tidak dapat memberikan makan kepada orang tua dan adik-adiknya jika dia tetap berada di LPKA kelas II Bengkulu.

c) Daftar anak didik tahun 2023

No	Nama Andik	Tindak Pidana
1	AQ	Pasal 365 KUHP Ttg Pencurian dengan kekerasan
2	ZL	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
3	SH	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
4	MR	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
5	MA	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
6	IN	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
7	M	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
8	RM	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian
9	M	Pasal 363 KUHP Ttg Pencurian

Jika dilihat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 8 anak dengan tindak pidana pencurian dan 1 anak dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2.2 Apa faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendukung terhadap proses pembinaan. Adapun faktor penghambat pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu, yaitu:

- a) Belum ada dasar hukum dan regulasi perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian berulang di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu.
- b) Program pelatihan yang berlangsung antara enam bulan hingga satu tahun ini terlalu singkat. Proses pembentukan karakter anak beradab memerlukan waktu karena remaja harus melalui tahap pengenalan, pendekatan, dan pembiasaan agar dapat memperhatikan pelajaran yang diajarkan. Peneliti menilai pelatihan tersebut tidak efektif dan memerlukan waktu yang lebih lama karena singkatnya masa pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu, hal ini disebabkan karena usia anak yang berada di atas 18 tahun. Tentu saja, mereka yang usianya di atas anak tersebut tidak ditempatkan di LPKA Kelas II Bengkulu.
- c) Minimnya sarana dan prasarana Sejak LPKA Kelas II Bengkulu 2 baru dibuka pada tahun 2015, masih terdapat sejumlah fasilitas yang kurang agar proses pembinaan dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, hanya ada satu gitar yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran musik, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Angka tersebut tentu kalah dibandingkan partisipasi LPKA Kelas II Bengkulu. Selain alat musik, sejumlah barang yang berhubungan

dengan olahraga, seperti shuttlecock untuk permainan bulu tangkis, juga dibeli dengan uang pribadi.

- d) Kurangnya ada Instruktur atau Pembina dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu. Dalam waktu 1 tahun, LPKA Kelas II Bengkulu diwajibkan melaksanakan minimal 4 kegiatan, akan tetapi kegiatan yang akan diselenggarakan tersebut tidak dikuasai oleh petugas maupun pembina yang ada di LPKA Kelas II Bengkulu. Untuk itu, LPKA Kelas II Bengkulu harus mencari instruktur itu juga memerlukan waktu yang lama karena sulitnya mencari instruktur yang ahli.

Upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu dalam menghadapi faktor-faktor penghambat pembinaan tersebut, antara lain:

- a) Menyusun sebuah perencanaan kerja lebih awal sehingga tidak ada kendala saat akan melakukan pembinaan.
- b) Adanya kerja sama tim, karena setiap pihak yang berada di LPKA Kelas II Bengkulu mempunyai wewenang dalam melaksanakan pembinaan dan pengayoman terhadap anak didik.

Adapun faktor pendukung dalam kegiatan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Bengkulu, yaitu:

- a) Semua pihak yang berada di LPKA Kelas II Bengkulu ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan hukum (perubahan perilaku, kelanjutan sekolah, kembali ke keluarga dan masyarakat).
- b) Kerjasama yang baik dengan beberapa mitra yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu dalam menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, tentunya dalam hal ini semata-mata demi mendorong keberhasilan pembinaan terhadap anak didik. Diantara mitra-mitra tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. BP Paud dan Dikmas Bengkulu
 - b. Kemenag Kota Bengkulu
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu
 - e. Universitas Muhamaddiyah Bengkulu

- f. Kwartir Cabang Pramuka Bengkulu
- c) Peran masyarakat sekitar yang ikut serta dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas anak didik selama di bina di LPKA.
- d) Sarana dan prasarana pendukung yang ada di LPKA.

KESIMPULAN

Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) menginformasikan formulir bimbingan bagi peserta didik di LPKA Kelas II Bengkulu. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang ditampung dalam satu asrama dengan anak yang melakukan tindak pidana lain di lembaga pembinaan khusus anak kelas II di Bengkulu. Namun, anak-anak yang melakukan kejahatan pencurian berulang kali lebih mendapat perhatian dan diutamakan dalam pelatihan sehari-harinya. Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur residivisme anak menjadi penghambat pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu. Kurangnya pelatih atau instruktur untuk mendukung kegiatan pelatihan siswa dan mengendalikan kejadian yang tidak terduga. Pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: Setiap orang yang terlibat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu mempunyai tanggung jawab terhadap masa depan anak yang bertabrakan dengan hukum. Mitra bekerja sama dengan baik untuk menawarkan pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lokasi dan tindakan siswa selama menjalani pelatihan di LPKA Kelas II Bengkulu, serta prasarana dan sarana pendukung di sana, menjadi penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, M. H., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2023). Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 67–80. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>
- Al, J., Syariah, F., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). *INDONESIA*. 3(1), 87–108.
- Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 29–49. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/15>

- GOOD, G. (2015). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 26–41.
- Hasanah, N., & Rinwigati, P. (2023). Pengungkapan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pers: Evaluasi Terhadap Dewan Pers Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 4325-4335. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Karmawan, K. (2020). Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17170>
- Maharidho Deel Ziko, & Mitro Subroto. (2022). Optimalisasi Kegiatan Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Anak Di Lpka Klas Ii Tanjung Pati. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 124–131. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46817>
- Marc, E., & Picard, D. (2006). L'école de Palo Alto. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Sagaf, U. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2), 33–42.
- Umar, N., & Bachmid, F. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 52–69. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38>